

**ANALISIS PERIMBANGAN KEUANGAN  
KABUPATEN BOJONEGORO  
TAHUN 1990/1991 - 2000/2001  
DALAM RANGKA PELAKSANAAN  
OTONOMI DAERAH TAHUN 2001**

KE  
C 51/02  
Gib  
a

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN  
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI  
JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN**



MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

**DIAJUKAN OLEH**

**SANDHY SUGJANTO**

**No. Pokok : 049715665**

**KEPADA  
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2002**

SKRIPSI

ANALISIS PERIMBANGAN KEUANGAN  
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 1990/1991 - 2000/2001  
DALAM RANGKA PELAKSANAAN  
OTONOMI DAERAH TAHUN 2001

DIAJUKAN OLEH  
SANDHY SUGIJANTO  
No. Pokok : 049715665

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH

DOSEN PEMBIMBING,

  
Drs. Ec. Bambang Sunarno

TANGGAL 10-07-2002

KETUA PROGRAM STUDI

  
Dra. Ec. Hj. Sri Kusreni, M.Si.

TANGGAL 10-07-2002

## ABTRAKSI

*Dalam era reformasi yang gejolak awal merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, yang kemudian digunakan sebagai alasan yang mencuatkan rasa ketidakpercayaan atas kepemimpinan Presiden Suharto. Yang kemudian setelah Presiden Habibie timbul rasa berontak masyarakat yang menginginkan desentralisasi yang sarat akan korupsi kolusi dan nepotisme.*

*Beranjak pada desakan masyarakatlah akhirnya lahir UU No. 22 dan UU No. 25 tahun 1999 sebagai jawaban atas aspirasi masyarakat yang ingin mengurus daerahnya sendiri dengan putra-putra daerah sebagai SDMnya.*

*Berawal dari kronologis itulah akhirnya skripsi ini sebagai kajian untuk melihat apakah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana UU No. 22 dan UU No. 25 tahun 1999 yang menyebutkan bahwa kabupaten/Kotalah yang menjadi ujung tombak pembangunan dan pelayanan masyarakat bisa menjalankan kewajiban yang diamanatkan oleh UU tersebut.*

*Pada skripsi ini mencoba untuk mengkaji posisi fiskal dan derajat desentralisasi fiskal serta bagaimana kontribusi PAD terhadap Penerimaan Pemerintah Daerah Kab. Bojonegoro yang pada akhirnya bisa memberikan gambaran bagaimana kondisi kesiapan Kab. Bojonegoro yang mengimplemantasikan No. 22 dan UU No. 25 tahun 1999 tersebut.*